

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Iran adalah sebuah negara yang dapat menjadi rujukan yang membuktikan bahwa sistem ekonomi islam pantas untuk bersaing di dunia ekonomi internasional. Iran sebelum kemenangan Revolusi, sangat bersahabat dengan Amerika, namun kedekatannya dengan negara adidaya itu membuat adanya ketidakteraturan ekonomi di dalam negeri Iran, karena Iran menjadi sangat bergantung pada negara tersebut dan AS pun ikut mencampuri urusan dalam negeri Iran. Hal itu mengakibatkan ketidakpuasan rakyat Iran terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung yang mendukung keberadaan AS. Dan itulah yang melatarbelakangi terjadinya revolusi Iran, namun hal tersebut membawa permasalahan lain dalam negeri Iran. Iran yang selalu dibantu untuk masalah keuangan oleh AS, setelah lepas dari AS menjadi terseok-seok dalam perekonomiannya. Saat itu, meskipun Iran sangat kaya minyak dan gas, namun malah dikenal sebagai negara dengan tingkat perekonomian rendah dan menjadi negara importir utama dunia.<sup>1</sup> Bahkan dalam memenuhi kebutuhan yang paling penting dan strategis pun, misalnya kebutuhan bahan pangan, Iran saat itu juga harus tergantung kepada bangsa asing. Kondisi ini telah membuat bangsa Iran pra-Revolusi berada dalam ketertinggalan dan dampaknya masih terus dirasakan selama beberapa tahun pasca kemenangan Revolusi.

---

<sup>1</sup><http://www.irib.com/worldservice/MelayuRadio/POLITIK/2006/februari06/revolusi.htm>, download tgl. 17 November 2006

Perekonomian Iran pascarevolusi boleh dikatakan centang-perenang. Ketakutan investor asing menyebabkan larinya modal besar-besaran yang hampir-hampir meruntuhkan sistem perekonomian dan keuangan negara itu. Ditambah lagi dengan adanya pembekuan harta negara itu di Amerika Serikat yang jumlahnya mencapai US\$ 12 Miliar. Perang dengan Irak dan masuknya dua juta pengungsi Afghanistan makin membuat parah krisis ekonomi yang terjadi.<sup>2</sup>

Dalam situasi sulit itu, pemerintah mengambil kebijakan penting di bidang ekonomi yakni dengan mengkonversi sistem ekonomi di negaranya dari sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi Islam atau Syari'ah. Reformasi dimulai pada Agustus 1983 dengan disahkannya UU Perbankan Islam. Saat itu, pemerintah Iran melakukan konversi "dalam satu hari", yaitu dengan mengumumkan bahwa bank tidak lagi membayar bunga, tapi bagi hasil. Namun, sisi aset baru benar-benar dapat dikonversi seluruhnya pada 1986, yang berarti memakan waktu tiga tahun, tahap demi tahap. Selain itu, Iran benar-benar berniat untuk memperbaiki perekonomiannya dengan mengandalkan kemampuan dalam negeri yang dimilikinya seperti kekayaan minyak yang ada di Iran dan tidak lagi mengandalkan negara lain. Pelaksanaan program tersebut dilakukan seiring dengan era embargo ekonomi yang dilancarkan AS dan sekutu-sekutunya. Terhadap Iran, AS telah memutuskan semua

---

<sup>2</sup> H. Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, 2000, hal. 78.

perdagangan dan investasi AS ke Iran, termasuk yang diputuskannya itu adalah pembelian minyak yang setahunnya bernilai 4 Milyar dollar AS.<sup>3</sup>

Namun pertumbuhan ekonomi Iran tetap terjadi secara konsisten seiring dengan terus berlangsungnya embargo ekonomi yang diterapkan AS terhadap Iran. Dalam masa kurang dari 10 tahun, Iran berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen. Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan ini menunjukkan kemampuan dan kegigihan bangsa Iran dalam menyingkirkan semua kesulitan dan tantangan. Berdasarkan laporan Bank Dunia, pada tahun 2005 lalu, Iran merupakan negara keempat di Timur Tengah yang pendapatannya tidak hanya bergantung kepada minyak. Selain itu, Iran juga merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Timur Tengah.

Perubahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Iran telah berhasil memutuskan ketergantungannya dari pihak asing. Kemajuan yang berhasil dicapai Republik Islam Iran dalam berbagai bidang, terutama ekonomi, merupakan parameter yang sangat jelas untuk mengukur transformasi mendasar yang terjadi di Iran setelah kemenangan Revolusi Islam. Keberhasilan yang dicapai Iran di bawah naungan sebuah sistem ekonomi Islam tentu saja memberikan kebanggaan kepada umat muslim pada umumnya. Iran telah berhasil membuktikan bahwa menjadikan Islam sebagai dasar negara sama sekali tidak menghalangi kemajuan perekonomian suatu bangsa. Selain itu, kemajuan Iran ini membuktikan bahwa sikap mandiri suatu bangsa

---

<sup>3</sup> "Embargo AS Terhadap Iran Diwarnai Kecurigaan dan Ketidakadilan", *Kompas*, 3 Mei 1995, Hal. 4.

dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada negara-negara adidaya justru akan memberi manfaat bagi bangsa itu sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan, perubahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Iran berhasil mendorong kemajuan ekonomi bangsa Iran dan bahkan lebih jauh lagi, telah memberikan semangat tak kenal menyerah kepada bangsa ini agar terus berjuang mempertahankan kemandirian dan menolak adanya segala bentuk tekanan dan campur tangan dari pihak asing.

Melihat perubahan kebijakan negara Iran, membangkitkan kembali eksistensi ekonomi islam. Ekonomi islam hadir menawarkan solusi yang komprehensif bagi pemecahan problem ekonomi umat manusia itulah yang membuat penulis tertarik untuk mengambil judul **"Upaya Pemerintah Iran Menerapkan Sistem Ekonomi Islam (Syari'ah) ditengah Gencarnya Embargo Amerika"** dalam penelitian ini.

## **B. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

Pertama : Penulisan ini diharapkan dapat mendeskripsikan seobjektif mungkin tentang keadaan ekonomi Iran Pra-revolusi dimana Iran masih sangat dekat dengan AS dan belum menggunakan sistem Hukum Islam dalam Pemerintahannya, yang itu berarti Iran masih dalam kondisi yang tidak stabil, segala kebutuhan hidup dalam negaranya bergantung pada negara lain.

Kedua : Penulisan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang perubahan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah negara Iran dalam kehidupan

perekonomian negara tersebut, yakni perubahan sistem ekonomi konvensional yang kemudian dikonversi menjadi sistem ekonomi syariah atau berlandaskan pada Hukum Islam, dengan tujuan agar dapat menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik.

Ketiga : Dalam penulisan ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa embargo Amerika tidak menghambat keberhasilan pembangunan ekonomi Iran, dan itu berarti sekaligus dapat menjelaskan bahwa sistem ekonomi islam dapat dijadikan sebuah alternatif dalam menyelesaikan masalah global.

Keempat : Dari penulisan ini pula dimaksudkan untuk menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari di bangku kuliah juga untuk memenuhi syarat akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang kesarjanaaan pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Poltik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Iran merupakan salah satu bangsa tertua di kawasan Timur Tengah. Dalam sejarahnya yang panjang ketika kerajaan Persia mengganti nama negaranya menjadi Iran pada tahun 1935, negeri ini telah menerima dan mengenal peradaban besar dalam sejarah umat manusia yakni Yunani, Roma, Byzantium, dan Islam. Tetapi sejak masuknya kebudayaan Eropa atau Barat di abad 19, Iran telah mengalami pemasukan kebudayaan asing secara besar-besaran. Mula-mula, diawali oleh Inggris dan Rusia, selanjutnya Amerika Serikat.

Iran memiliki hubungan yang cukup erat dengan Amerika Serikat (AS) ketika berada dibawah pemerintahan Mohammad Reza Pahlevi (1941-1979). Bagi AS, Iran merupakan bagian dari strategi globalnya di kawasan Timur Tengah, dan Iran berfungsi sebagai *buffer state* guna membendung pengaruh komunisme di kawasan Teluk Parsi. Sedangkan bagi Iran, AS memiliki arti penting bagi pemberi bantuan modal dan teknologi yang digunakan untuk memperkuat industri militer Iran.

Hubungan Iran-AS menjadi semakin erat terutama pada akhir Perang Dunia II. Dengan bantuan CIA, Reza Pahlevi berhasil menggagalkan kudeta yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Dr. Mohammad Mossadeq pada tahun 1953. Pada tahun 1957, CIA membantu pembentukan polisi rahasia Iran, SAVAK (*Sazeman-e Ettela Va Amniyet-e Keshvar*) yang diandalkan untuk melumpuhkan golongan oposisi. Dan pada tahun 1959, Pahlevi menandatangani persetujuan bilateral di bidang militer dengan AS, sehingga Iran terintegrasi ke dalam sistem militer dan politik Barat<sup>4</sup>. Ketergantungan Iran yang berlebihan terhadap AS justru membawa kehancuran bagi Pahlevi. Besarnya pengaruh AS membuat adanya ketidakstabilan ekonomi dan *de-islamisasi*<sup>5</sup>. Hal inilah yang melahirkan ketidakpuasan rakyat terhadap Shah dan memuncak sehingga terjadilah Revolusi Islam Iran pada tanggal 11 Februari 1979 yang menggulingkan kekuasaan Pahlevi dengan di bawah pimpinan Ayatollah Rohullah Khomeini.

---

<sup>4</sup> M. Riza Sihbudi, at al, *Profil Negara-negara Muslim*, cetakan I, Bandung, Penerbit MIZAN, 1999, Hal. 78.

<sup>5</sup> *Ibid*

Eksistensi Republik Islam Iran di kancah politik internasional diawali dengan kepemimpinan Khomeini sebagai sosok revolusi yang mengubah hubungan persahabatan Iran-AS selama tiga dasawarsa menjadi permusuhan. Di bawah pemerintahan Khomeini, politik Luar Negeri Iran secara Yuridis-formal berdasarkan pada 7 prinsip sebagai berikut<sup>6</sup> :

- a. Menolak segala bentuk dominasi
- b. Mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah
- c. Mempertahankan hak-hak umat islam
- d. Non Blok / *Laa Syarqiyyah Laa Gharbiyyah* (tidak timur tidak barat)
- e. Berdamai dengan negara yang tidak agresif
- f. Menganggap kemerdekaan, kebebasan dan keadilan sebagai hak-hak universal
- g. Mendukung setiap perjuangan kaum tertindas tapi menahan diri dari segala bentuk intervensi

Ketujuh prinsip diatas merefleksikan tekad Khomeini untuk tidak akan bekerjasama dengan AS demi kepentingan nasionalnya meskipun Iran berada di bawah tekanan AS.

Setelah Iran di bawah kekuasaan Khomeini, semangat anti Amerika semakin tinggi dan berkeyakinan bahwa akibat campur tangan AS terhadap urusan dalam negeri Iran justru membuat rakyat semakin menderita. Kemarahan terhadap AS inilah

---

<sup>6</sup> "Undang-undang Dasar Republik Islam Irak" pasal 152 & 154, dikutip dari M. Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran*, Jakarta, Pustaka Hidayah, 1989, hal. 143-144.

yang kemudian menimbulkan tindakan revolusioner dan mendorong banyak terjadinya pemusnahan anti-Islam yang pada puncaknya yaitu terjadinya penyanderaan 52 warga negara AS di Kedutaan Besar AS di Teheran selama 444 hari dan pada bulan November 1979<sup>7</sup>. Setelah peristiwa tersebut, terjadilah krisis pada hubungan AS-Iran, sehingga pada akhirnya diputuskanlah hubungan diplomatik AS-Iran.

Setelah pemutusan hubungan diplomatik tersebut, AS banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan Iran. Diawali dengan pemihakan AS pada Irak di masa perang Irak-Iran (1980-1988), membantu kelompok oposisi Iran, menghancurkan dua pertiga angkatan laut Iran, serta mengebom instansi minyak Iran. Dan pada tahun 1988 menembak jatuh pesawat sipil Iran yang terbang di atas perairan internasional yang menewaskan 280 orang<sup>8</sup>. AS juga membekukan aset Iran sebesar US\$ 12 milyar<sup>9</sup>. Iran dianggap pula sebagai negara sponsor utama terorisme di dunia internasional, mengembangkan senjata nuklir dan pemusnah masa yang dapat mengancam keamanan negara-negara tetangganya. Apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran mempunyai dampak yang sangat besar bagi Iran terutama untuk masalah perekonomian di negara tersebut. Iran saat itu, meskipun sangat kaya minyak dan gas, namun malah dikenal sebagai negara dengan tingkat perekonomian rendah dan menjadi negara importir utama dunia.

---

<sup>7</sup> Stepen Zunes, *In Focus*: "Iran", Vol. 2, No. 42, August 1997.

<http://www.foreignpolicy-infocus.org/briefs/vol2/v2n4iran>. Download tgl 23 Oktober 2006.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> "Insight", 27 Februari & 11 September 1989, dikutip dari M. Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah*, Bandung, Penerbit Mizan, 1991, hal. 223.



Namun kemudian, dalam situasi sulit itu, pemerintah bertekad untuk tidak lagi mengandalkan negara lain untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri negaranya terutama kepada Amerika. Pemerintah Iran sadar bahwa sudah saatnya mereka memanfaatkan kekayaan alam atau sumber daya alam yang mereka miliki untuk dapat memperbaiki perekonomian di negaranya. Iran mempunyai kekayaan alam yang sangat besar terutama minyak, sebagai sumber utama kehidupan di Iran. Minyak pertama kali ditemukan di Iran pada tahun 1901. Industri perminyakan di Iran mempunyai peran penting dalam percaturan politiknya, yang sangat riskan menimbulkan suatu krisis dalam negeri yang serius.

Minyak Iran meliputi 10 % dari hasil-hasil sumber-sumber minyak di seluruh dunia. Perhitungan dilakukan dalam ribuan barrel. Pada tahun 1974, jumlah produksi minyak Iran 2.210.627 dibanding dengan Irak 679.803, Kuwait 830.520, Arab Saudi 2.996.543, Mesir 53.175, Libya 555.291, Indonesia 501.838, Australia 140.890, Cina 474.500, Rumania 107.964, Uni Sovyet 3.373.650, Kanada 616.532, Mexico 238.271, Argentina 1.514.110, Venezuela 1.086.332, dan Amerika Serikat 3.199.328.<sup>10</sup> Jumlah produksi yang sangat besar ini mengindikasikan bahwa kandungan minyak di Iran sangat melimpah sehingga menjadi kekayaan dan kebanggaan tersendiri bagi seluruh rakyat Iran, oleh sebab itulah, rakyat Iran sangat menginginkan negaranya bisa maju tanpa menggantungkan pada negara lain.

Untuk mewujudkan tekadnya Pemerintah Iran menghambil kebijakan yakni dengan mengkonversi sistem ekonomi konvensional di negaranya menjadi sistem

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 37

ekonomi syariah sejalan dengan revolusi islam yang sebelumnya telah dilakukan di Iran.<sup>11</sup> Hal tersebut dimulai pada Agustus 1983 dengan disahkannya UU perbankan Islam. Pemerintah dan rakyat Iran berharap bahwa dengan cara mereka yang menekankan ajaran islam dalam perekonomiannya, dapat mengubah keadaan ekonomi negara itu. Pemerintah Iran terus berusaha dan memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk dapat mewujudkan harapannya tersebut. Oleh sebab itu perubahan kebijakan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, dan memakan waktu yang tidak sebentar.

Tekad yang bulat dan disertai dengan semangat "Berdiri Diatas Kaki Sendiri" ternyata membuahkan hasil, walaupun perlahan namun sejalan dengan membaiknya perekonomian, reformasi terus dilakukan. Embargo ekonomi yang dilakukan Amerika sejak awal Iran ingin melepaskan diri dari Amerika justru semakin gencar dilakukan oleh pemerintah AS saat mengetahui perubahan dalam negeri Iran. Negara-negara adidaya yang selama era pra Revolusi mendominasi perekonomian di Iran dan meraup keuntungan besar dari kekayaan alam Iran, terus-menerus berusaha memburuk-burukkan citra Iran melalui kekuatan propaganda yang mereka miliki. Mereka juga merasa khawatir negara-negara muslim lain akan bangkit meniru Iran apabila memang langkah yang diambil Iran dapat memperbaiki perekonomian dalam negerinya dan kemudian ikut memutuskan ketergantungan dari negara-negara adidaya. Bila hal ini terjadi, sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian besar bagi negara-negara adidaya itu. AS dengan dibantu sekutu-sekutunya tidak henti-

---

<sup>11</sup> H. Adiwirman, *op cit.*, hal 79

hentinya berusaha menjegal Iran dengan berbagai cara, termasuk dengan membekukan aset Iran yang disimpan di bank Amerika. Kinipun, ketika Iran tengah berupaya menguasai teknologi nuklir untuk kepentingan sipil, AS melakukan berbagai langkah illegal untuk menghalanginya. Padahal, melalui penguasaan teknologi nuklir ini, Iran tengah berpikir jangka panjang, yaitu agar di masa depan ketika energi fosil habis, Iran tetap bisa mandiri dan tidak perlu mengimpor energi dari negara-negara adidaya.

Dibutuhkan nyali besar bagi Israel dan Amerika untuk menghadapi Iran secara *face to face* (terbuka). Meskipun secara ekonomi Iran tidak begitu menggembirakan dibanding negara-negara kapitalis, namun kekompakan dan dukungan rakyat terhadap pemerintah menjadikan setiap sudut negara ini sebagai bom pemusnah massal. Walaupun embargo Amerika sempat membuat perekonomian Iran sedikit terseok-seok namun yang patut kita teladani adalah slogan dan motto hidup rakyat Iran. Mereka dengan bangga bertutur pada dunia bahwa "Berdiri di Atas Kaki Sendiri" itu lebih mulia.

Semangat tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi Iran terjadi secara konsisten seiring dengan terus berlangsungnya embargo ekonomi yang diterapkan AS terhadap Iran. Walaupun hambatan datang dari berbagai pihak namun kini, Iran secara perlahan namun pasti dapat mulai melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap bangsa lain terutama pada Amerika.

Dalam masa kurang dari 10 tahun, Iran bisa mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program

pembangunan ini menunjukkan kemampuan dan kegigihan bangsa Iran dalam menyingkirkan semua kesulitan dan tantangan dalam negerinya.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dari uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan ini adalah:

Bagaimana upaya pemerintah Iran menerapkan sistem ekonomi islam di negaranya untuk mempertahankan eksistensinya di ditengah gencarnya embargo Amerika?

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

Seperti diketahui, dalam berpikir, manusia menggunakan "bahasa" yaitu suatu sistem komunikasi yang terdiri dari simbol-simbol dan serangkaian aturan yang memungkinkan berbagai pengkombinasian simbol-simbol itu. Sedangkan konsep adalah salah satu simbol yang paling penting dalam bahasa. Ilmu atau sains mulai dengan menciptakan konsep-konsep untuk mendeskripsikan dunia empiris. Semua ilmu mengembangkan peristilahan atau terminologi sendiri untuk mendefinisikan dan menggambarkan bagian dari dunia kehidupan yng ditanganinya. Begitu pula Ilmu Hubungan Internasional. Untuk memahami bagaimana ilmuwan hubungan interasional mempelajari dunia hubungan internasional, kita harus mengerti bahasa

yang dipakai dalam ilmu ini. Suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek atau suatu fenomena tertentu.<sup>12</sup>

Dengan kata lain, konsep adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. Konsep dalam ilmu sosial menunjuk pada sifat-sifat dari objek yang dipelajarinya (misalnya, orang, kelompok, negara atau organisasi internasional) yang relevan bagi studi tertentu.<sup>13</sup> Untuk itu, sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Kekuatan Nasional dan Konsep Ekonomi Islam.

### 1. Konsep Kekuatan Nasional

Dalam hal ini, kita mencermati tentang *power* (*kekuasaan; kekuatan*) yang terkait pada struktur kekuasaan dalam suatu Negara. Konsep *power* menempati posisi yang istimewa dalam studi politik dan hubungan internasional. Mengenai definisi dan hakekat *power* terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. *Kautilya*, seorang tokoh negarawan India Kuno yang menulis karya besar pada abad ke-4 S.M, menafsirkan *power* sebagai “pemilikan kekuatan” (yaitu suatu atribut yang, berasal dari tiga unsur pengetahuan; kekuatan, militer dan keberanian).<sup>14</sup>

Sedangkan menurut *K.J Holsti*, *power* diartikan sebagai kemampuan umum suatu Negara untuk menguasai atau mengawasi perilaku Negara lain. Sehingga dalam konsep *power*, kata *Holsti*, setidaknya mengandung dua unsur pokok, yaitu *pengaruh*

---

<sup>12</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal. 93.

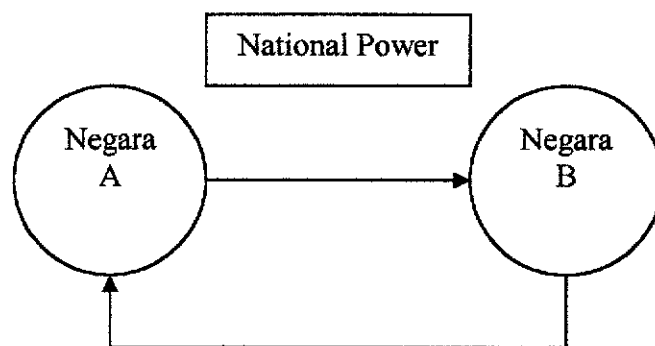
<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 94

<sup>14</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3S, Jakarta, 1994, hal. 116

(*influence*), dan *kapabilitas* (*capability*). Unsur *pengaruh* diperlukan sebagai perangkat untuk mencapai atau mempertahankan tujuan. Sedangkan *kapabilitas* merupakan kekuatan fisik atau mental yang dipergunakan sebagai perangkat pendesak untuk membujuk, mengancam, atau memberikan sanksi kepada Negara lain.<sup>15</sup>

Dalam pengertian yang hampir serupa, *H.J Morgenthau* memilih mendefinisikan *power* sebagai hubungan antara dua actor politik di mana actor A memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan actor B. Untuk lebih jelasnya, pengertian *power* menurut *Morgenthau* dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1  
Kerangka Hubungan National Power (H.J Morgenthau)

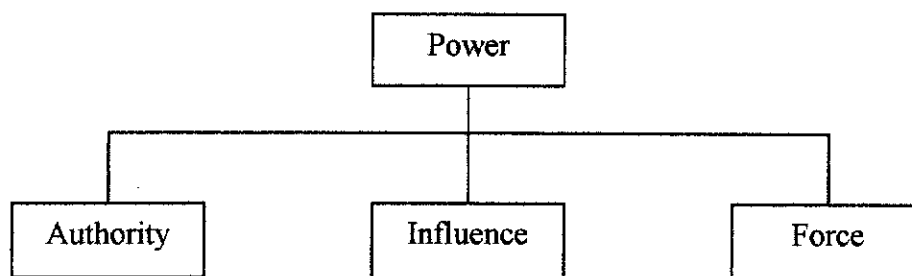


(Sumber: R. Soeprapto, *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hal. 117)

<sup>15</sup> Umar Suryadi Bakry, *Pengantar Hubungan Internasional*, Jayabaya University Press, Jakarta, 1999, hal. 64

*Coulumbis* dan *Wolfe* juga setuju bahwa *power* merujuk pada "apa saja" yang bisa menciptakan dan mempertahankan pengendalian aktor (negara) A terhadap aktor (negara) B. Kedua pakar itu melihat *power* sekurang-kurangnya memiliki tiga unsur penting; yaitu: daya paksa (*force*), pengaruh (*influence*), dan wewenang (*authority*). Yang dimaksud *daya paksa* adalah ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi, dan sarana pemaksa lainnya. Sementara *pengaruh* bisa diartikan sebagai pengaruh alat-alat atau cara-cara persuasi (tanpa kekerasan) yang memungkinkan tindakan negara B sesuai dengan keinginan negara A. Sedangkan *wewenang* berarti adanya sikap tunduk secara sukarela negara B pada arahan atau kebijakan yang diberikan negara A.<sup>16</sup> Dengan demikian, konsep *power* bisa digambarkan dalam skema berikut:

Tabel 2  
Unsur-unsur *power* (*Coulumbis* dan *Wolfe*)



(Sumber: Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3S, Jakarta, 1994, hal.119)

*Morgenthau* juga mengemukakan bahwa ada sembilan unsur dalam kekuatan nasional, yaitu yang *tangible*, mencakup geografi, sumber daya alam, kemampuan

<sup>16</sup> Bakry, *op.cit.*, hal. 65

industri, kesiagaan militer, dan penduduk. Sedangkan yang *intangible* mencakup karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Unsur yang akan kita ambil untuk penelitian ini terkait dengan pola *tangible* ialah mengenai sumber daya alam yang dimiliki oleh Iran, yakni minyak dan gas alamnya. Semakin besar jumlah kekayaan minyak yang dimiliki suatu negara semakin besar power yang dimiliki oleh negara tersebut. Demikian juga dengan Iran, Iran merupakan negara penghasil minyak terbesar setelah Arab Saudi dan penghasil Gas Alam terbesar setelah Rusia. Dengan kekayaan yang dimilikinya, Iran dapat mengandalkan kekuatan dalam negerinya untuk bersaing di dunia internasional tanpa campur tangan pihak asing.

Terkait dengan pola *Intangible* disini yang akan kita cermati adalah mengenai adalah karakter nasional, karena didalamnya mengandung satu bagian yang sangat penting untuk menjelaskan konsep selanjutnya, yaitu mengenai kekuatan budaya dan ideologi sebagai factor yang sangat menentukan.<sup>17</sup>

Pola *power* mencakup karakteristik respon yang dimiliki manakala *power* negara lain menunjukkan ancaman potensial atau aktual terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara didalam sistem internasional. Dalam hal ini Iran mempunyai *power* yang berupa kuatnya karakter nasional yang melekat dalam diri bangsanya. Itu yang digunakan Iran untuk menghadapi *power* yang berasal dari negara lain yang telah menunjukkan ancamannya terhadap dalam negeri Iran, yakni Amerika Serikat.

---

<sup>17</sup> Disarikan dari Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa, Buku Pertama*, terj: S. Maimoen, Yayasan Obor Indonesia (Jakarta: 1990).



Amerika yang sebelumnya ingin menjadikan Iran sebagai salah satu negara bonekanya akhirnya dapat dihadapi Iran dengan mengandalkan karakter negaranya. Iran merupakan suatu negara yang mempunyai karakter yang sangat kuat terhadap ajaran-ajaran islam. Selain itu, sebagian besar masyarakat Iran menganut ideologi atau mazhab Syi'ah. Ideologi secara umum dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka.

Ideologi Syi'ah Iran menunjukkan bahwa para penganut mazhab ini mempunyai ketaatan yang luar biasa terhadap sang Imam. Segala sesuatu yang diucapkan dan dilakukan sang Imam akan senantiasa dipatuhi oleh pengikut-pengikutnya. Di samping itu tradisi Syi'ah selalu tidak menghendaki adanya penguasaan oleh negeri asing yang menggunakan kekuatan penguasa dalam negeri. Itulah yang mendasari pergolakan melawan kekuasaan Amerika Serikat di Iran.

## **2. Konsep Ekonomi Islam**

Dalam konsep ekonomi Islam, prinsip di dalamnya dapat dihasilkan dari syari'ah. Prinsip ini merupakan representasi dari *hard core* ekonomi islam. Bangunan konsep dalam islam, adalah berkaitan dengan upaya peneliti dalam mengembangkan rancangan ekonomik dari ilmu ekonomi yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan legal dan juga prinsip etik tentang perilaku konsumen. Akan tetapi Al-Qur'an tidak memberikan konsep konsumsi dan investasi. Al-Qur'an tidak

menceritakan tentang tehnik peramalan untuk memproyeksikan keadaan ekonomi. Dan Al-Qur'an pun tidak membahas bahwa manusia harus memakai uang sebagai alat tukar menukar atau jual beli dalam bermasyarakat. Al-Qur'an hanya memberikan landasan dasar dan prinsip umum tentang perilaku pembuat keputusan ekonomi.<sup>18</sup> Oleh karena itu, dalam konsep ekonomi islam akan dibahas lebih lanjut mengenai kegiatan ekonomi manusia yang tentunya sesuai dengan kerangka Muamalat islam serta menjelaskan mengenai kepemilikan dalam pandangan islam.

**a. Kegiatan Ekonomi dalam Kerangka Muamalat Islam**

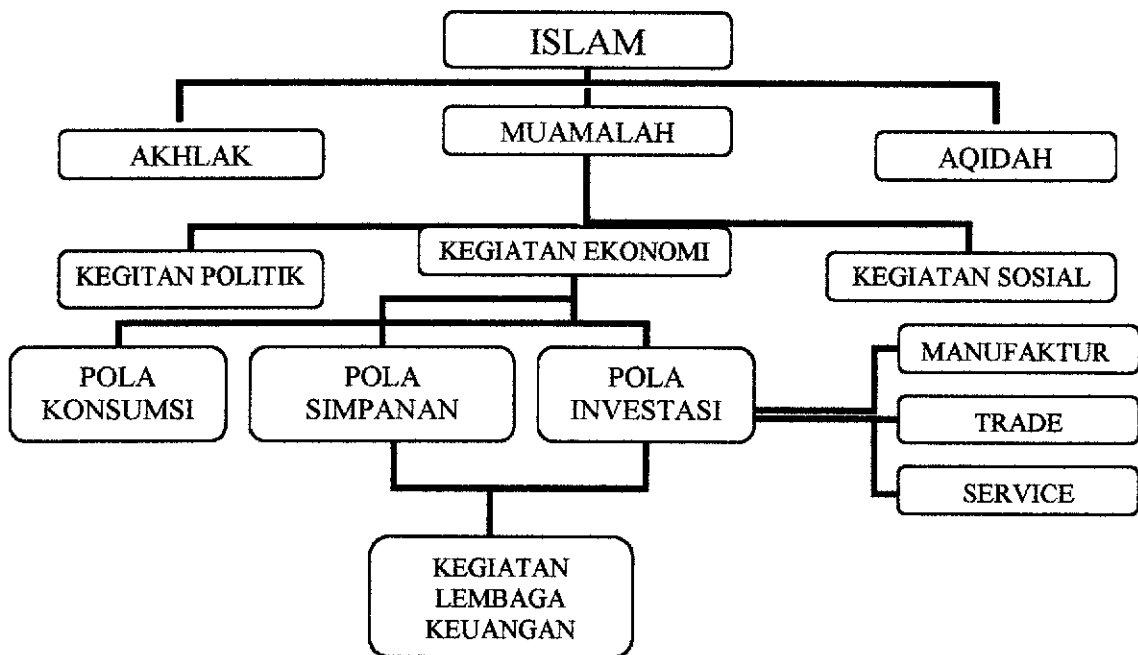
Islam sendiri terbagi atas tiga aspek, yaitu: akhlaq, muamalah dan aqidah. Dalam kerangka kegiatan muamalah inilah yang secara garis besar membahas mengenai tiga bagian besar yaitu: politik, sosial dan ekonomi. Dari ekonomi dapat diambil tiga turunan lagi yaitu: konsumsi, simpanan dan investasi. Berbeda dengan sistem yang lainnya, islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat (tengah-tengah), tidak berlebihan tidak juga keterlaluan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut, mengenai siklus keterkaitan antara pola konsumsi, simpanan, investasi dalam kerangka muamalat islam.

Tabel 3

Siklus keterkaitan antara Pola-pola Ekonomi dalam Kerangka Muamalat Islam

---

<sup>18</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Penerbit Ekonisia, 2003, Hal. 74.



(Sumber: Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta, 2003, Hal. 74)

Dari gambar diatas tampaklah jelas bahwa dimensi muamalah salah satu wujudnya adalah aktivitas ekonomi. Dalam konteks inilah kehadiran lembaga ekonomi mutlak adanya (*dharurah*), karena ia bertindak sebagai *intermediate* antara *unit supply* dengan *unit demand*. Untuk menggerakkan aktivitas ekonomi maka diperlukan lembaga keuangan. Dan itulah mengapa penulis mengambil konsep ekonomi islam karena akan dijelaskan mengenai sistem perbankan di Iran yang telah dikonversi dari sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi islam dan pada akhirnya menentukan perekonomian negara tersebut. Karena sistem perbankan dan keuangan yang ada saat itu memang harus direformasi untuk menghambat konsumsi primer, pengangguran dan ekspansi moneter yang tidak sehat, yang menyusahkan

semua orang.<sup>19</sup> Sistem perbankan dan keuangan memiliki pengaruh luar biasa dalam perekonomian modern, sehingga tak ada sistem perekonomian manapun yang dapat bertahan sehat maupun kontribusi positif pada sasaran sosio-ekonomi tanpa dukungan positif dari perbankan.

#### **b. Kepemilikan sebagai Salah Satu Cakupan Ekonomi Islam**

Legalitas ekonomi islam dengan segala objektivitasnya bukan tak terbatas oleh unsur atau aspek empirik bahkan teoritik, karena itu ekonomi islam yang merupakan suatu bagian teori sosial memiliki batasan-batasan material meliputi unsur-unsur dasar yaitu: identifikasi kepentingan dan keperluan manusia, cara-cara pengelolaan sumber ekonomi, pengesahan dan pemberdayaan atas hak kepemilikan kekayaan, penetapan-penetapan transaksi komersial, pengukuran atau penentuan alat-alat tukar menukar, dan aspek ekonomi lainnya.

Muhammad Akram Khan telah mendapat verifikasi dari seorang ulama ahli hadits Maulana Malik Kandhalwi, menyatakan bahwa dalam cakupan konsep ekonomi islam dibagi dalam 3 kategori, yakni<sup>20</sup>:

- Faktor-faktor produksi : tanah, tenaga kerja, modal
- Perdagangan dan konsumsi
- Masalah ekonomi : masalah kepemilikan, kekayaan, keuangan negara, mekanisme pasar, pembangunan ekonomi dan nilai-nilai ekonomi.

<sup>19</sup> Dr. M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta, Gema Insani Press, 2000, hal. 203

<sup>20</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Penerbit Ekonisia, 2003, Hal. 86

Elemen-elemen ini merupakan ruang lingkup ekonomi islam yang dibangun melalui suatu bentuk pengetahuan. Oleh karena itu, pengkajian dan pengembangan pengetahuan ekonomi islam mendasarkan aspek-aspek tersebut pada dasar kebenaran etika yang digali dari sumber-sumber agama. Juga dibentuk dengan membantu akselerasi-akselerasi nilai yang bersifat empirik, sehingga elemen-elemen ini menjadi objek yang dapat diuji obyektivitasnya maupun realibilitasnya.

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor produksi, yang didalamnya mencakup mengenai tanah, tenaga kerja dan modal, ekonomi islam memberikan batasan yang jelas mengenai pelaksanaannya. Misalnya, dalam membahas masalah tanah, Al-Qur'an tidak membahas mengenai bagaimana legalitas kepemilikan tanah itu sendiri, namun kemudian konsep ekonomi islam memunculkan adanya hukum-hukum tanah, yang mengatur tentang bagaimana cara menghidupkan tanah mati, mengelola tanah, dan juga larangan menyewakan tanah. Demikian juga kejelasan mengenai modal, juga dijelaskan dalam konsep ekonomi islam bahwa modal.

Berkait dengan itulah yang kemudian penulis ambil sebagai salah satu landasan konsep untuk menjelaskan mengapa pemerintah Iran sekarang lebih memprioritaskan pembangunan pertanian yang padat karya daripada padat modal. Karena berdasarkan pengalaman masa Shah, yang lebih prioritas pada padat karya, Iran sangat mengandalkan modal asing dan itu yang ingin dihapus oleh pemerintah selanjutnya dan memprioritaskan pembangunan padat karya yang memanfaatkan lahan pertanian dalam negerinya karena memang 75% rakyat disana bermata pencaharian sebagai petani.

Sedangkan mengenai masalah ekonomi yakni mengenai pengelolaan kekayaan dan masalah kepemilikan sumber-sumber alam. Identifikasi kepentingan atau keperluan (*need and interest basicly*) yang mencakup pengkajian atas segala kebutuhan manusia atau lembaga-lembaga yang bersifat materi atau jasa, berbentuk individual atau kolektif, dan skala prioritas atau komplementer. Pembatasan ini akan menentukan dan menganalisis segala jenis kebutuhan yang bersifat ekonomi, guna menetapkan keselarasan diantara kepentingan individu dan kolektif. Pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang dimaksud adalah pemberdayaan sumber-sumber ekonomi, baik berasal dari sumber daya alam yang terbatas atau sumber daya manusia atas dasar keahlian dan persamaan. Pemberdayaan sumber daya alam yang terbatas diarahkan pada pengeksplotasian serta pemanfaatan yang memiliki akuntabilitas ekonomis secara merata, serta menghindarkan penumpukan kekayaan alam pada satu individu atau kelompok tertentu. Sedang pengelolaan sumber daya manusia menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan kebersamaan dalam distribusi kekayaan atau pendapatan, dengan melindungi hak-hak atau kepentingan disamping kemaslahatan bersama.

Pembatasan atas hak pemanfaatan kekayaan memberi batasan kepada pembenaran upaya memperoleh kekayaan (aset-aset), disamping pengelolaan pemanfaatan secara objektif, membebaskan dari praktek-praktek yang mengandung unsur kedzaliman dengan menghilangkan hak atau kepentingan pihak lain. Transaksi-transaksi komersial akan memperjelas pengesahan tata cara mendapatkan kekayaan

dan dalam perhitungan secara sah, dengan dilandasi transparansi serta objektivitas yang mengedepankan unsur keadilan dan etika<sup>21</sup>.

Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, dimana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum Muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Makna kepemilikan adalah adanya kekuasaan pada diri seseorang atas harta miliknya. Atas dasar inilah, maka tiap hak milik yang pengelolaannya tergantung pada pandangan khalifah, maka hak milik tersebut dianggap sebagai hak milik negara.<sup>22</sup>

Berangkat dari uraian tersebut, dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai upaya Pemerintah Iran dalam menerapkan Sistem Ekonomi Islam di Negeranya, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang dipegang oleh Pemerintah Iran karena ingin membebaskan dari praktek-praktek kedzaliman dan dari campur tangan pihak asing. Pemanfaatan kekayaan, dalam hal ini adanya barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi, barang-barang tersebut seperti misalnya garam, batu mulia, tambang emas, minyak, gas alam, tembaga, dan lain sebagainya.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya, Risalah Hati, 1996, Hal. 243

## **F. Hipotesa**

Upaya Pemerintah Iran menerapkan sistem ekonomi islam negaranya untuk mempertahankan eksistensinya di ditengah gencarnya embargo Amerika dilakukan dalam berbagai tahapan, adapun tahapan kebijakan yang diambil adalah:

1. Konversi Sistem Ekonomi Syariah sebagai Alternatif, dengan tahapan:
  - a. Restrukturisasi Perbankan (1979-1982)
  - b. Adopsi Sistem Perbankan Syariah (1982-1986)
  - c. Integrasi Sistem Perbankan Syariah (sejak 1986)
2. Kebijakan Ekonomi Islam Menyangkut Bidang Pertanian
3. Kepemilikan Sumber Daya Alam Sebagai Kekuatan Dalam Negeri Iran.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Penentuan batas-batas ruang lingkup penelitian dimaksudkan agar penelitian ini dapat lebih terfokus, untuk itu penulis mengambil batasan yakni penelitian yakni Iran setelah revolusi islam Iran (1979) sampai tahun 1986 saat Iran meresmikan penggunaan Sistem Ekonomi Islam, namun tanpa mengabaikan kejadian-kejadian waktu lain yang relevan dengan pokok pembahasan.

## **H. Metodologi Penulisan**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Penggunaan metode ini ditempuh dengan mempertimbangkan fakta yang ada dan mengamati data yang relevan, untuk selanjutnya dianalisa guna mendapatkan



kesimpulan. Data yang dimanfaatkan terutama adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa buku-buku, artikel, surat kabar, dan atau majalah serta sumber-sumber lain seperti situs internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini yaitu terdiri dari :

**Bab I**, Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan hal-hal yang bersifat normatif dan juga aturan baku dalam penulisan skripsi, diantaranya yaitu Alasan Pemilihan Judul yang berisi tentang mengapa hal tersebut dijadikan sebagai suatu permasalahan dalam judul skripsi yang akan ditulis; Tujuan Penulisan berisi tentang untuk apa sesuatu itu dibuat; Latar Belakang Masalah yaitu berisi gambaran masalah yang akan dijadikan penelitian dalam skripsi ini; Pokok Permasalahan berisi tentang permasalahan apa yang akan dibahas; Kerangka Dasar Pemikiran yakni alat untuk menganalisa permasalahan yang berupa konsep-konsep yang relevan sehingga akan didapat jawaban yang valid; Hipotesa yaitu memuat jawaban umum dalam suatu penulisan skripsi; Jangkauan Penulisan yaitu memuat waktu dari kapan sampai kapan masa yang akan dibahas; Metodologi Penulisan yaitu cara-cara yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta Sistematika Penulisan yaitu berisi tentang gambaran data-data yang akan dikembangkan dalam penulisan ini.

**Bab II**, Menjelaskan tentang gambaran umum mengenai keadaan ekonomi Iran Pra-revolusi dimana Iran masih bersahabat dengan Amerika yang pada saat itu

perekonomian dan kebutuhan sehari-hari dalam negeri Iran sangat bergantung pada Amerika. Kemudian karena masyarakatnya merasa tertekan dengan campur tangan Amerika, maka dijelaskan juga mengenai adanya Revolusi Islam Iran yang menandai bahwa Iran ingin melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap negara lain terutama Amerika serta menerapkan prinsip "berdiri di atas kaki sendiri".

**Bab III**, Menggambarkan kondisi perekonomian Iran yang kacau balau setelah lepas dari Amerika dan usahanya dalam menghadapi gencarnya embargo Amerika terhadap Iran.

**Bab IV**, Menjelaskan mengenai mengapa dan bagaimana upaya pemerintah menerapkan sistem ekonomi islam di negaranya melalui beberapa tahapan kebijakan dan ditengah gencarnya embargo Amerika dan setelah itu menggambarkan kondisi Iran setelah adanya perubahan kebijakan di bidang ekonomi

**Bab V**, Berupa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.